



# 2022

## LAKIP

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Benteng, Februari 2023

**KEPALA BADAN,**



**Drs. MUHTAR, M.M.**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680104 199603 1 001**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;
4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah;
10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya;
12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang

capaiannya 100% yaitu indikator kinerja nilai Lakip, indikator kinerja laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi (SAP) dan indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan ada 1 (satu) indikator kinerja yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk indikator kinerja nilai Lakip dan indikator kinerja opini BPK dinilai berdasarkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6
D. Isu-isu Strategis	16
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>22</b>
A. Rencana Strategis	22
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kerja Tahunan	28
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>61</b>
A. Pengukuran Kinerja	62
B. Analisis Capaian Kinerja	66
C. Realisasi Keuangan	91
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>107</b>
<b>Lampiran Kinerja Tahun 2023</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam mengimplementasikan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan realisasi

**C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

**1. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan pelaksanaan tugasnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam pemenuhan realisasi target kinerja dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;

4. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
6. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
7. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
9. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. Menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah;
11. Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

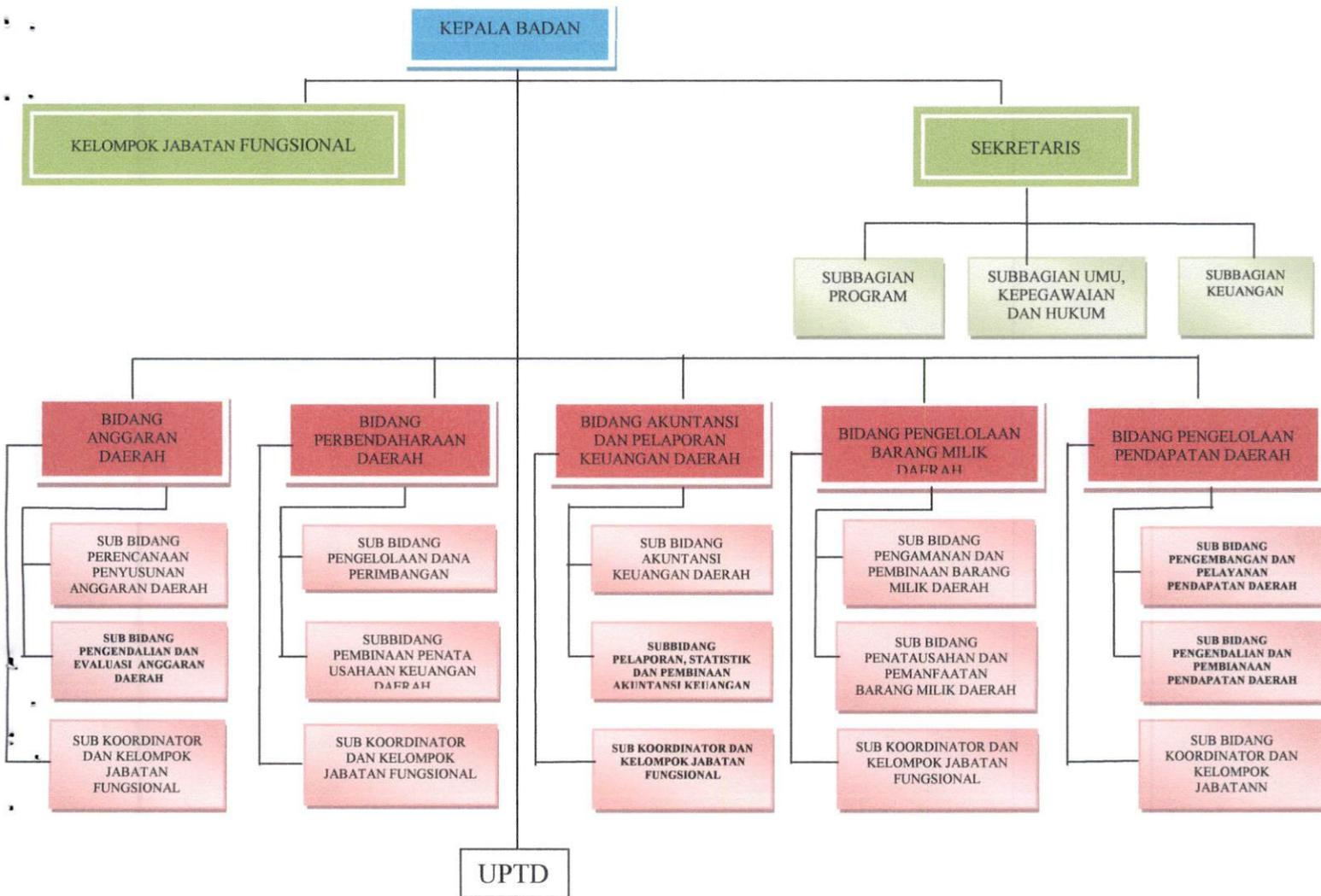
12. Mengoordinasikan dan menyeleggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
16. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Badan
- II. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub. Bagian Program;
  2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
  3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari atas :
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;
  2. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
  - 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
  - 2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
  - 1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
  - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  - 1. Sub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



#### 4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 57 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

##### a. Berdasarkan golongan ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	0
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	15
4.	Penata (III/c)	5
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	12
6.	Penata Muda (III/a)	7
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	9
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur (II/b)	0
JUMLAH		52

**b. Berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	10
2.	S1	26
3.	D III	2
4.	SMA	14
JUMLAH		52

**c. Berdasarkan jenis kelamin**

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	3	1
2.	III	18	21
3.	II	3	6
JUMLAH		24	28

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 36 orang (69,23%), Diploma III sebanyak 2 orang (3,84%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang (26,92%). Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

#### **D. Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar masih menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Bidang Anggaran Daerah :
  - a. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
  - b. Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
  - c. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
  - d. Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
  - e. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah :

- a. Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
- b. Peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian; dan
- c. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah :

- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
- b. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
- c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;

- d. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
- e. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
- f. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
- g. Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;
- h. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
- i. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik;
- j. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun;

- k. Belum tersedianya aplikasi penggajian yang memadai dan belum adanya sarana penunjang pemeliharaan aplikasi penggajian Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- a. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan asset;
  - b. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai;
  - c. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
  - d. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan;
  - e. Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
  - f. Belum optimalnya sinegritas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual;
  - g. Prosedur penilaian BMD belum memadai; dan
  - h. Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasos/fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi.

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Belum optimalnya Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah;
- c. Masih rendahnya kompetensi aparatur tentang perpajakan daerah;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
- e. Belum optimalnya Pengelolaan PBB-P2; dan
- f. Masih rendahnya kompetensi aparatur tentang PBB-P2.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merumuskan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan timbul.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar yakni **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi dan dimana misi kesatu adalah mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya nilai SAKIP OPD, meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

TUJUAN		SASARAN	
NO	URAIAN	NO	URAIAN
1.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Meningkatnya nilai SAKIP OPD
		2.1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.	Meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang tersedia	3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

**a. Strategi**

Rumusan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi kinerja/hasil;

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

**b. Arah Kebijakan**

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain :

1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

**B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar memuat informasi tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama disertai penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -						Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2,85%	8,25%	5,48%	5,69%	3,46%	1,52%	1,52%

### C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja. Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	1.1	Nilai LAKIP perangkat daerah	CC
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.1	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tepat Waktu
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		4.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%

#### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian

Kinerja dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPD	TARGET
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	B
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	WTP 8,25%

**No Program**

**Anggaran**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 15.877.463.219  
 Rp. 140.545.014.150  
 Rp. 892.323.000  
 Rp. 1.965.623.700  
**Rp. 159.280.424.069**

Benteng, 3 Januari 2022

**BUAPTI KEPULAUAN SELAYAR**

**Plt. KEPALA BADAN,**

**H. MUH. BASLI ALI**

**Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740626 199311 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
SEKRETARIS BADAN**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUAR AN	HASIL	KET
<b>A</b>	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
<b>I</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>II</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
<b>III</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>IV</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyusunan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>V</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Unit Peralatan dan Mesin	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		Lainnya yang Disediakan			
<b>VI</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	
<b>VII</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyusunan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Benteng, 3 Januari 2022

**Plt. KEPALA BADAN,**

**SEKRETARIS BADAN,**

**Drs. MESDIYONO, M. Ec., v.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740626 199311 1 002

**HUSAIN, S. Sos.**

Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19710623 199402 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
BIDANG ANGGARAN DAERAH**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
<b>A</b>	<b>Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
<b>I</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Tersusunnya KUA dan PPAS	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Penyusunan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Penyusunan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
<b>II</b>	<b>Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	

**Plt. KEPALA BADAN,**

**Drs. MESDIYONO, M.Ec.,Dev.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740626 199311 1 002

Benteng, 3 Januari 2022

**KABID. ANGGARAN DAERAH,**

**WAHYUNINGSIH, S.E.,MM.**

Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19780213 200803 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL
1	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Tersedianya Laporan Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengedalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SK	Tersedianya SK Pengelola Keuangan Daerah
		Penerbitan SPD untuk semua OPD	SPD	Tersedianya Dokumen SPD untuk semua OPD
		Penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh OPD	SP2D	Terbitnya Dokumen SP2D
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Bank BPD SulSelBar	Laporan	Tersedianya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
4	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	Laporan	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Piutang dan Pelunasan Utang Daerah dengan Pihak Ketiga

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	Laporan	Terlaksananya Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah pada Beberapa Bank dalam Bentuk Deposito
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD
		Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Laporan	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Daerah, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Penyusunan Laporan Aliran Kas	Laporan	Tersusunnya Laporan Aliran Kas
		Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Tersusunnya Laporan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD	Laporan	Tersusunnya data hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

				SKPD
		Rekonsiliasi Pemungutan Pajak SKPD melalui Mekanisme GU/TU/LD	Laporan	Tersusunnya data hasil rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD
8	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Perekaman data Gaji ASN dan Penerbitan daftar Gaji untuk OPD	Dokumen	Tersedianya Daftar gaji Semua Organisasi Perangkat Daerah
		Penelitian Kelengkapan Dokumen Pencairan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Untuk Penerbitan SP2D Gaji OPD	Dokumen	Tersedianya SP2D Gaji Induk, SP2D TPP, Kekurangan Gaji dan Gaji susulan Semua Organisasi Perangkat Daerah
		Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai yang Pensiun, Pegawai Wafat dan Pegawai Yang Pindah	Dokumen	Tersedianya SKPP
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Iuran Wajib Pegawai setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

9	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Membuat Rekapitulasi Potongan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Sebagai Dasar Tagihan Pihak PT Taspen (PERSERO) Kepada Pemerintah Daerah	Dokumen	Tersedianya data Potongan iuran JKK dan JKM
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Penerimaan iuran JKK dan JKM setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)
		Membuat Rekapitulasi Potongan BPJS 4 % dan IWP 1%	Dokumen	Tersedianya data Potongan BPJS 4% dan IWP 1%
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak BPJS Kesehatan terkait iuran 1% bagi Pekerja dan iuran 4% bagi Pemberi setiap empat bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan BPJS Kesehatan
10	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perkiraan Belanja Daerah, Rekapitulasi Transaksi harian Belanja Daerah dan laporan Posisi Kas Bulanan	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Daerah
		Melakukan perekaman data sebagai syarat Penyaluran DAK FISIK	Laporan	Terlaksananya penyaluran Dana DAK dari RKUN ke RKUD

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

		Membuat Laporan Realisasi Pembayaran Gaji Induk PNSD dengan TPP dan Realisasi Pembayaran gaji Induk PPPK dengan TPP	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Pegawai
--	--	---	---------	---

Benteng, 3 Januari 2022

**Plt. KEPALA BADAN,**

**KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,**

**Drs. MESDIYONO, M.Ec.,Dev.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740626 199311 1 002

**ZULFADLI, S.E.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
<b>A</b>	<b>Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
<b>1</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Penyusunan Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

<b>No</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KELUARAN</b>	<b>HASIL</b>	<b>KET</b>
1	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Tersedianya Standar Harga	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		b. Jumlah Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang didistribusikan kepada Wajib Pajak	Dokumen SPTPD	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen LHP	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		b. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		
		c. Jumlah Objek Pajak daerah yang dimonitoring	Laporan hasil kegiatan		
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	a. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		b Jumlah konsultasi, koordinasi dan monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah	
--	--	--	---------	--	--

Benteng, 3 Januari 2022

**Plt. KEPALA BADAN,**

**KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH,**

**Drs. MESDIYONO, M.Ec.,Dev.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740626 199311 1 002

**ANDI RUMBIYAH MANAJAI, S.P.,MM.**

Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19750131 200604 2 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
SUB. BAGIAN PROGRAM**

<b>No</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KELUARAN</b>	<b>HASIL</b>	<b>KET</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Benteng, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS BADAN,**

**KASUBAG. PROGRAM,**

**HUSAIN, S.Sos.**

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

**AGUNG PURNAMA, S.Sos.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19830823 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
SUB. BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
<b>A</b>	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
<b>I</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>II</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyusunan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyusunan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>III</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	
<b>IV</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	
<b>V</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyusunan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
---	--	--	---------	--	--

Benteng, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS BADAN,**

**KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN  
& HUKUM**

**HUSAIN, S.Sos.**

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

**ROSNAH, S.E.,MM.**

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP. 19750404 201101 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
SUB. BAGIAN KEUANGAN**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
---	---	--	---------	---	--

Benteng, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS BADAN,**

**KASUBAG. KEUANGAN,**

**HUSAIN, S.Sos.**

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19710623 199402 1 003

**RITAWATI, S.S.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19831229 201101 2 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
 BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Tersedianya Laporan Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SK	Tersedianya SK Pengelola Keuangan Daerah	
		Penerbitan SPD untuk semua OPD	SPD	Tersedianya Dokumen SPD untuk semua OPD	
		Penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh OPD	SP2D	Terbitnya Dokumen SP2D	
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Bank BPD SulSelBar	Laporan	Tersedianya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

4	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	Laporan	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Piutang dan Pelunasan Utang Daerah dengan Pihak Ketiga	
		Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	Laporan	Terlaksananya Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah pada Beberapa Bank dalam Bentuk Deposito	

Benteng, 3 Januari 2022

**KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,**

**ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH,**

**ZULFADLI, S.E.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

**ANDI FITRIANI, S.E.**

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

NIP. 19820905 200903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	a. Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD  b. Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Dokumen  Laporan	a. Terlaksananya · a Verifikasi Dokumen Pencairan SKPD  b. Terlaksananya · a Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Daerah, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	a. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	a. Tersusunnya · Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
		b. Penyusunan Laporan Aliran Kas	Laporan	b. Tersusunnya · Laporan Aliran Kas	
		c. Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	c. Tersusunnya · Laporan Pemungutan / Pemotongan dan	

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

				Penyetoran	
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	a.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD	Laporan	a Tersusunnya data hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD
		b.	Rekonsiliasi Pemungutan Pajak SKPD melalui Mekanisme GU/TU/LD	Laporan	b Tersusunnya data hasil rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD

Benteng, 3 Januari 2022

**KABID PERBENDAHARAAN  
DAERAH,**

**KASUBID. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN DAERAH**

**ZULFADLI, S.E.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

**NUR HIDAYAH MUCHTAR, S.E., Ak**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 197102172010012003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
BIDANG PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Perekaman data Gaji ASN dan Penerbitan daftar Gaji untuk OPD	Dokumen	Tersedianya Daftar gaji Semua Organisasi Perangkat Daerah	
		Penelitian Kelengkapan Dokumen Pencairan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Untuk Penerbitan SP2D Gaji OPD	Dokumen	Tersedianya SP2D Gaji Induk, SP2D TPP, Kekurangan Gaji dan Gaji susulan Semua Organisasi Perangkat Daerah	
		Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai yang Pensiun, Pegawai Wafat dan Pegawai Yang Pindah	Dokumen	Tersedianya SKPP	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Iuran Wajib Pegawai setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)	
2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Membuat Rekapitulasi Potongan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Sebagai Dasar Tagihan Pihak PT Taspen (PERSERO) Kepada Pemerintah Daerah	Dokumen	Tersedianya data Potongan iuran JKK dan JKM	
		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak PT Taspen (PERSERO) terkait Penerimaan iuran JKK dan JKM setiap Tiga bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan PT. Taspen (PERSERO)	
		Membuat Rekapitulasi Potongan BPJS 4 % dan IWP 1%	Dokumen	Tersedianya data Potongan BPJS 4% dan IWP 1%	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak BPJS Kesehatan terkait iuran 1% bagi Pekerja dan iuran 4% bagi Pemberi setiap empat bulan sekali dalam setahun	Dokumen	Tersedianya data Realisasi yang cocok antara Pemda dan BPJS Kesehatan	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perkiraan Belanja Daerah, Rekapitulasi Transaksi harian Belanja Daerah dan laporan Posisi Kas Bulanan	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Daerah	
		Melakukan perekaman data sebagai syarat Penyaluran DAK FISIK	Laporan	Terlaksananya penyaluran Dana DAK dari RKUN ke RKUD	

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Membuat Laporan Realisasi Pembayaran Gaji Induk PNSD dengan TPP dan Realisasi Pembayaran gaji Induk PPPK dengan TPP	Laporan	Terlaksananya Pelaporan Belanja Pegawai	
--	---	---------	---	--

Benteng, 3 Januari 2022

**KABID PERBENDAHARAAN DAERAH,**

**KASUBID PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN,**

**ZULFADLI, S.E.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780612 200604 1 024

**EMMA, S.E.**

Pangkat : Penata, III/c

NIP. 19780518 201410 2 001

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022; dan
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 dinilai melalui pengukuran pencapaian target Renstra 2021-2026. Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA			TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Nilai daerah	LAKIP perangkat	B
2.	Meningkatnya tertib administrasi	2.1	Laporan sesuai	Keuangan Standar OPD Akuntansi	Sesuai

	pengelolaan keuangan dan aset daerah		Pemerintahan (SAP)	
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		4.1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	8,25%

Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah telah melaksanakan beberapa capaian kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	2021		2022		
				Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai	CC	CC	56,41%	B		
2	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

3.	Opini terhadap laporan keuangan daerah	BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP		
4.	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah		Persen	2,85%	5,36%	5,36%	8,25%	5,39%	5,39%

Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Lakip Perangkat Daerah untuk Tahun 2022 dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijabarkan pada Lakip tahun anggaran berikutnya sehingga yang terjabarkan pada Lakip tahun 2022 adalah nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh karena Nilai Lakip Perangkat Daerah tahun 2022 dinilai pada tahun berikutnya sedangkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saat ini masih sedang berjalan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 5,39% namun tidak mencapai target dari yang di targetkan sebesar 8,25% disebabkan atau di pengaruhi oleh karena adanya rekening penerimaan pendapatan (JKN) sebesar 2,86% yang bergeser dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ke Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## B. Analisa Capaian Kinerja

Pada akhir tahun anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokkan dan dianalisa sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

**Tabel 6.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU 1)**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	2021		2022		
				Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai	CC	CC	56,41	B		

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian singkat Organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja disampaikan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Salah satu faktor utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja guna menjamin peningkatan dalam pelayanan publik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan yang ditargetkan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan terhadap sistem akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal;
5. Pencapaian Kinerja.

#### **Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2021**

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil yang didapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar atas Sistem Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah 56,41 dengan predikat CC (cukup) dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja : 20,03;
- b. Pengukuran Kinerja : 8,75;
- c. Pelaporan Kinerja : 8,87;
- d. Evaluasi Internal : 4,54; dan
- e. Pencapaian Kinerja : 14,23.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2021, realisasi mendapatkan nilai CC (cukup) dengan kriteria yaitu akuntabilitasnya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun demikian masih memerlukan banyak perbaikan untuk penyempurnaannya. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat pada aspek Perencanaan Kinerja antara lain disebabkan karena perjanjian kinerja tidak menyajikan IKU, perjanjian kinerja belum dipublikasikan, dan dokumen perjanjian kinerja tidak selaras dengan Renstra. Pada aspek pengukuran kinerja yang dianggap perlu di sempurnakan adalah belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, IKU belum dipublikasikan/diupload ke dalam website/media lain yang memudahkan publik untuk mengakses, dan pengukuran kinerja

belum dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya adalah pada aspek pelaporan kinerja disebabkan juga oleh karena belum dipublikasikan/diupload ke dalam website/media lain yang memudahkan publik untuk mengakses. Penyempurnaan untuk aspek evaluasi internal yaitu belum terdapat pemantauan rencana aksi yang seharusnya digunakan untuk mengendalikan kinerja. Terakhir adalah penyempurnaan pada aspek pencapaian kinerja terdapat target kinerja kegiatan yang tidak tercapai dan informasi capaian kinerja yang dilaporkan belum seluruhnya dapat diandalkan. Oleh karena itu pada tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan perbaikan sebagaimana direkomendasikan Inspektorat, sehingga pada tahun 2022 bisa mendapatkan penilaian B.

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan**

Masih terdapat beberapa kelemahan dari segi Pengukuran Kinerja yaitu dalam hal pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

**Solusi (Rekomendasi)**

Berdasarkan faktor keberhasilan dan hambatan tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan oleh tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan selayar antara lain dari sisi perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.**

**Tabel 7.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU 2)**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	2021		2022		
				Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

**3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.**

**Tabel 8.  
Indikator Kinerja Utama (IKU 3)**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
					2021			2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP		

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkup Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Entitas Pemeriksa Laporan Keuangan pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2022 yang telah disusun diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2023 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan Pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang nantinya akan diberikan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2021**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 47.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, hasil Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran Kinerja ke-2 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas laporan Keuangan tahun 2021 berupa WTP 100% tercapai.

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan akuntabilitas OPD,

penghitungannya dilakukan dengan memberikan point pada masing-masing opini. Target point ditetapkan sebagai berikut :

Apabila mendapat opini “Tidak Wajar”, maka point yang diberikan adalah 1 (satu);

Apabila mendapat opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan adalah 2 (dua);

Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan

Apabila mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Target point} \times 100}{\text{Target Point opini}} = \text{Persentase Realisasi}$$

$$\frac{4 \text{ (empat)} \times 100}{4} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dilakukan perhitungan capaian yaitu :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi} \times 100}{\text{Persentase target}} = \text{Persentase capaian realisasi}$$

$$\frac{100\% \times 100}{100\%} = 100\%$$

### **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas yang mendukung pencapaian opini WTP atas LKD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, dengan Pendukung Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

### **Faktor Penghambat Keberhasilan**

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 menjelaskan bahwa masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Solusi (Rekomendasi)**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha

meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

**4. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.**

**Tabel 9.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU 4)**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2021			2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	2,85%	5,36%	5,36%	8,25%	5,39%	5,39%

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

**Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2022**

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 65.338.779.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.165.510.423,63 atau mencapai 82,90% atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 11.173.268.576,37.

Berdasarkan realisasi tersebut di atas, capaian indikator pendapatan asli daerah tidak tercapai dengan persentase realisasi sebesar 82,90% dari persentase 100% yang ditargetkan di tahun 2022, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- tidak tercapainya sektor retribusi daerah dengan persentase pencapaian sebesar 72,95% tidak terlampaui sebesar Rp. 811.374.830,00;

- tidak tercapainya sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase pencapaian sebesar 99,73% tidak terlampaui sebesar Rp. 32.965.451,24; dan
- tidak tercapainya sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan persentase pencapaian 71,18% tidak terlampaui sebesar Rp. 11.377.076.200,61.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 10.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		%
		TARGET	REALISASI	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		65.338.779.000,00	54.165.510.423,63	82,90
1.	Pajak daerah	10.655.430.000,00	11.703.577.905,48	109,84
2.	Retribusi daerah	3.000.028.000,00	2.188.653.170,00	72,95
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.204.038.000,00	12.171.072.548,76	99,73
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	39.479.283.000,00	28.102.206.799,39	71,18

Sumber : LRA-PAD per 31 Desember 2022

### 1. Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.000.028.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 2.188.653.170,00 atau mencapai 72,95% yang bersumber dari komponen retribusi daerah :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum mencapai 106,14% atau terlampaui sebesar Rp. 48.430.000,00; terealisasi sebesar Rp 836.974.000,00 dari target sebesar Rp 788.544.000,00. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lain, retribusi pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Akan tetapi terdapat penerimaan retribusi jasa umum yang melebihi target yaitu penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 116,05%, retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 111,55%, dan retribusi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 103,59%.

2. Capaian Retribusi Jasa Usaha hanya mencapai 60,39% atau tidak terlampaui sebesar Rp 766.984.930,00 hanya terealisasi sebesar Rp 1.169.499.070,00 dari target sebesar

Rp.1.936.484.000,00. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah rendahnya penerimaan retribusi pemakaian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pasanggarahan/vila, retribusi pemakaian laboratorium, retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, retribusi tempat pelelangan, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Akan tetapi terdapat penerimaan retribusi yang melebihi target yaitu sebesar 313,43%, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebesar 202,38%, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 145,50%.

3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai 66,25% tidak terlampaui sebesar Rp 92.819.900,00 atau realisasi sebesar Rp 182.180.100,00 dari target sebesar Rp.275.000.000,00. Adapun komponen yang mempengaruhi capaian realisasi tersebut yaitu rendahnya

capaian pada retribusi pemberian izin mendirikan bangunan.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

**Tabel 11.**  
**Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022**

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>3.000.028.000,00</b>	<b>2.188.653.170,00</b>	<b>72,95</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>788.544.000,00</b>	<b>836.974.000,00</b>	<b>106,14</b>
R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	330.500.000,00	383.540.000,00	116,05
R. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	177.969.000,00	198.524.000,00	111,55
R. Pelayan Kesehatan	50.000.000,00	23.840.000,00	47,68
R. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.800.000,00	208.000.000,00	103,59
R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.275.000,00	9.900.000,00	87,80
R. Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	18.000.000,00	12.670.000,00	70,39
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.936.484.000,00</b>	<b>1.169.499.070,00</b>	<b>60,39</b>
R. Pemakaian Kekayaan Daerah	94.924.000,00	138.119.000,00	145,50
R. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	500.000.000,00	185.089.050,00	37,02
R. Penyediaan Tempat Pelelangan	205.852.400,00	87.400.000,00	42,46
R. Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	23.000.000,00	46.548.000,00	202,38
R. Pelayanan Tempat Khusus	70.344.000,00	5.377.000,00	07,64

	Parkir			
	R. Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Villa	260.094.000,00	30.725.000,00	11,81
	R. Pelayanan Kepelabuhanan	629.069.600,00	575.457.020,00	91,48
	R. Pemakaian Kendaraan Bermotor	101.200.000,00	3.600.000,00	3,56
	R. Pemakaian Laboratorium	19.500.000,00	2.5000.000,00	12,82
	R. Pemakaian Alat	30.000.000,00	94.028.000,00	313,43
	R. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.500.000,00	605.000,00	24,20
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>313.650.000,00</b>	<b>119.962.500,00</b>	<b>38,25</b>
	R. Izin Mendirikan Bangunan	307.500.000,00	119.962.500,00	39,01

Sumber LRA-PAD per 31 Desember 2022

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada bagian laba yang di bagikan kepada pemerintah daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) realisasi penerimaannya mencapai 100,59% atau sebesar Rp 12.171.072.548,76 melewati dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 12.100.000.000,00, dan tidak ada realisasi penerimaan pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 104.038.000,00. Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

**Tabel 12.**  
**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**  
**yang Dipisahkan Tahun 2022**

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>12.204.038.000,00</b>	<b>12.171.072.548,76</b>	<b>99,73</b>
Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD BPR (Lembaga Keuangan)	12.100.000.000,00	12.171.072.548,76	100,59
Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD BPR (Bidang Air Minum)	104.038.000,00	-	-

Sumber LRA-PAD per 31 Desember 2022

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, realisasi penerimaannya adalah sebesar 71,18% atau sebesar Rp 28.102.206.799,39 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 39.479.283.000,00.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut:

**Tabel 13.**  
**Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah**  
**yang Sah Tahun 2022**

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>39.479.283.000,00</b>	<b>28.102.206.799,39</b>	<b>71,18</b>
Penerimaan Jasa Giro	1.293.000.000,00	1.593.611.412,18	123,25
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.119.658.000,00	2.931.621.591,11	93,97
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.403.556.000,00	2.572.670.590,00	34,75
Pendapatan BLUD	27.663.069.000,00	21.004.303.206,10	75,93

Sumber LRA-PAD per 31 Desember 2022

### **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber pada:

1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
2. Penggalian potensi objek/subjek baru baik Pajak maupun Retribusi Daerah.
3. Peningkatan sarana prasarana, peningkatan mutu pelayanan baik segi perizinan, maupun administrasi pemungutan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Faktor penghambat keberhasilan**

1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah.
2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi antar SKPD masih rendah.

**Solusi (Rekomendasi)**

Berdasarkan beberapa penghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan kinerja OPD serta BUMD dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya.

**C. Realisasi Keuangan**

Analisis capaian keuangan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas LRA, NERACA, dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur akuntansi secara berkesinambungan.

Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar Rp 155.129.330.051,00 terealisasi sebesar Rp 152.355.028.946,00 atau 98,21%. Adapun uraian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14.**  
**Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>17.039.663.469,-</b>	<b>15.202.507.493,-</b>	<b>89,21</b>
1.	Belanja Pegawai	5.737.182.779,-	4.779.768.731,-	83,31
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.194.728.690,-	10.315.016.762,-	92,14
3.	Belanja Modal	107.752.000,-	107.722.000,-	99,97

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 155.129.330.051,00 selanjutnya dialokasikan untuk merealisasikan 4 (Empat) program, 14 (Empat Belas) kegiatan yang tertuang pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) subkegiatan.

Alokasi pagu anggaran dan realisasi perprogram tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 15.**

**Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah per Program**

<b>PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.108.639.919,00	10.510.899.977	86,80
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	140.164.506.732	139.210.632.617	99,31
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	853.159.700,00	788.425.020,00	92,41
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.003.023.700,00	1.845.071.332,00	92,11
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>155.129.330.051,00</b>	<b>152.355.028.946</b>	<b>98,21</b>

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 152.355.028.946,00 atau 98,21%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun tahun 2021 dan tahun 2022, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 16.

**Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>Target</b>	181.787.001.492,00	155.129.326.051,00
<b>Realisasi</b>	180.253.134.576,00	152.355.028.946,00
<b>Persentase ( % )</b>	99,16%	98,21%

Sedangkan realisasi target anggaran per program per kegiatan dan per sub kegiatan di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17.

**Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan dan per Sub kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA HASIL/ KELUARAN		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.108.639.919</b>	<b>10.510.899.977</b>			<b>86,80%</b>
<b>A.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.400.000</b>	<b>30.807.500</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>98,11%</b>
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	5.100.000	3 Dokumen	3 Dokumen	94,44%
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.849.000	2 Dokumen	2 Dokumen	96,99%
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	6.948.000	2 Laporan	2 Laporan	99,25%
7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.000.0000	2.910.000	1 Laporan	1 Laporan	97,00%
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.273.619.879,-</b>	<b>4.432.385.549,-</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>84,05%</b>
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Indikator Kinerja : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.220.949.879	4.389.792.049	59 Orang	59 Orang	84,08%
2	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12.500.000	12.500.000	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	10.170.000	10.170.000	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	10.000.000	9.923.500	1 Dokumen	1 Dokumen	99,23%
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	24 Laporan	24 Laporan	100%
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.412.000	4.412.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Indikator Kinerja : Jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49.098.000	23.456.000	4 Orang	4 Orang	47,77%
<b>D</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	19.304.000	19.304.000	5 paket	5 paket	100%
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80.379.500	74.394.500	1 paket	1 paket	92,55%
3	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33.422.000	26.789.000	360.000.000	360.000.000	80,15%
4	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15.500.000	10.050.000	1 Dokumen	1 Dokumen	64,83%
5	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.933.000	75.074.000	1 Laporan	1 Laporan	97,58%
6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.890.000	433.586.235	1 Laporan	1 Laporan	99,24%
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
1	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	95.000.000	94.970.000	2 Unit	2 Unit	99,97%

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

<b>F</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.002.681.540,-</b>	<b>5.285.671.193,-</b>			<b>88,05%</b>
1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3.974.502.868	3.405.742.276	3 Laporan	3 Laporan	85,69%
2	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6.000.000	0	2 Laporan	0	0%
3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1.533.072.672	1.425.753.120	1 Laporan	1 Laporan	93,00%
<b>G</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	450.830.000	424.376.797	80 Unit	80 Unit	94,13%
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	38.276.000	29.799.000	34 Unit	34 Unit	77,85%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>695.281.000,-</b>	<b>4.185.563.443</b>			<b>92,59%</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1	<i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang di susun	48.762.000	46.222.800	2 Dokumen	2 Dokumen	94,79%
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di susun	45.899.000	45.751.600	2 Dokumen	2 Dokumen	99,68%
3	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	16.230.000	15.267.000	45 Dokumen	45 Dokumen	94,07%
4	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	15.795.000	13.917.000	45 Dokumen	45 Dokumen	88,11%
5	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	15.925.000	15.925.000	45 Dokumen	45 Dokumen	100 %
6	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	15.925.000	15.925.000	45 Dokumen	45 Dokumen	100 %
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	190.090.000	187.995.500	3 Dokumen	3 Dokumen	93,47%
8	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Indikator Kinerja : Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	189.855.000	189.260.550	3 Dokumen	3 Dokumen	99,69%
9	<i>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20.000.000	19.100.000	7 Dokumen	7 Dokumen	95,50%
10	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan	46.670.000	44.915.900	12 Dokumen	12 Dokumen	96,24%
11	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.130.000	68.232.500	12 Dokumen	12 Dokumen	97,29%
12	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20.000.000	19.031.800	12 Dokumen	12 Dokumen	95,16%
<b>B</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					
1	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	40.000.000	39.916.000	12 Dokumen	12 Dokumen	99,79%
2	<i>Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000	14.959.600	1 Laporan	1 Laporan	99,73%
3	<i>Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	37.500.000	37.426.749	2 Dokumen	2 Dokumen	99,80%

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	dan SPD					
4	<i>Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	36.800.000	36.794.800	1 Dokumen	1 Dokumen	99,99%
5	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.000.000	99.887.086	12 Dokumen	12 Dokumen	99,89%
6	<i>Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan Bank	25.313.000	25.113.600	12 Dokumen	12 Dokumen	99,21%
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil	22.668.000	22.506.200	12 Laporan	12 Laporan	99,29%

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
8	<i>Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	32.900.000	32.745.000	12 Dokumen	12 Dokumen	99,53%
9	<i>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.796.000,00	33.666.800,00	2 Dokumen	2 Dokumen	99,62%
10	<i>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	37.800.000	37.550.800	30 Orang	30 Orang	99,34%
<b>C</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					
1	<i>Koordinasi Pelaksana Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil koordinasi Pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	11.518.950	11.434.000	1 Laporan	1 Laporan	99,26%
2	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	19.447.200	19.016.700	12 Dokumen	12 Dokumen	97,79%
3	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	30.451.400	30.451.400	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	18.017.300	17.796.022	3 Laporan	3 Laporan	98,77%
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Rancangan Perda Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD	445.990.100	445.977.057	1 Dokumen	1 Dokumen	99,99%

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	Kabupaten/Kota					
6	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	23.124.400	23.124.400	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Kerugian Daerah	27.890.200	27.667.000	5 Dokumen	5 Dokumen	99,20%
8	<i>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	18.192.300	18.192.300	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	<i>Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan statistik keuangan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota	23.294.300	23.135.000	1 Laporan	1 Laporan	99,32%
<b>D</b>	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	134.369.518.582	134.367.893.153	1 Laporan	1 Laporan	99,99%
2	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.250.000.000	1.444.530.800	1 Laporan	1 Laporan	64,20%

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

3	<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1.500.000.000	1.369.303.500	1 Laporan	1 Laporan	91,29%
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>					
1	<i>Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	360.000.000	360.000.000	71 Orang	71 Orang	100%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>853.159.700,-</b>	<b>788.430.820,-</b>			<b>92,41%</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
1	<i>Penyusunan Standar Harga</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Standar Harga yang di susun	72.960.000	72.742.058	1 Dokumen	1 Dokumen	99,70%
2	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah rencan kebutuhan barang milik daerah	28.200.000	27.954.800	45 Dokumen	45 Dokumen	99,13%
3	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	27.000.000	26.754.600	1 Laporan	1 Laporan	99,09%
4	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah LHI Barang Milik Daerah	72.000.000	71.736.600	1 Laporan	1 Laporan	99,63%
5	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	418.815.000	356.813.862	1 Laporan	1 Laporan	85,20%

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

6	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.600.000	29.998.800	1 Laporan	1 Laporan	94,11%
7	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah	62.804.700	61.989.300	100 Dokumen	1 Dokumen	98,70%
8	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	92.400.000	92.201.200	4 Laporan	4 Laporan	99,79%
9	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	17.540.000	17.501.200	1 Laporan	1 Laporan	99,78%
10	<i>Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30.840.000	30.732.400	25 Orang	25 Orang	94,86%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.002.423.700,-</b>	<b>1.845.071.332,-</b>			<b>92,14%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					
1	<i>Perencanaan pengelolaan pajak daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	626.451.000	550.776.671	12 Dokumen	12 Dokumen	86,51%
2	<i>Analisa dan Pengembangan</i>					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	<i>Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	80.500.000	79.187.100	2 Dokumen	2 Dokumen	98,37%
3	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	27.000.000	26.795.000	1 Laporan	1 Laporan	99,24%
4	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	129.000.000	128.660.400	4 Unit	4 Unit	99,74%
5	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan hasil pendataan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek pajak dan wajib pajak daerah	307.210.300	305.957.050	20 Laporan	20 Laporan	99,59%
6	<i>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	51.000.000	50.976.400	1 Laporan	1 Laporan	99,95%
7	<i>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOPnya	59.380.000	59.280.800	20 Obyek Pajak	20 Obyek Pajak	99,83%
8	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : jumlah dokumen ketetapan Pajak daerah	53.800.000	53.785.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99,97%
9	<i>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>					

*LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*

	Indikator Kinerja : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48.500.000	46.678.600	100 Layanan	100 Layanan	96,24%
10	<i>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah di lakukan penelitian dan verifikasi	34.100.000	33.900.800	1 Dokumen	1 Dokumen	99,42%
11	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	154.940.000	144.707.000	1 Dokumen	1 Dokumen	87,59%
12	<i>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	37.000.000	33.240.000	1 Dokumen	1 Dokumen	89,84%
13	<i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	34.000.000	34.575.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99,93%
14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	359.542.400	296.551.511	1 Laporan	1 Laporan	82,48%

**Sumber : RFK per 31 Desember 2022 dan DPAP TA 2022**

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan per program rata-rata tercapai 95,38%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2021 yang hanya 83,60%. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang penyerapannya sangat rendah yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan persentase

penyerapan sebesar 47,77% hal ini disebabkan karena capaian realisasi tidak sesuai dengan target kinerja yang direncanakan, dimana target yang seharusnya jumlah orang yang mengikuti Diklat akan tetapi terealisasi adalah rincian belanja alat tulis kantor. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan pada penempatan akun belanja yang tidak sesuai dengan indikator dan output dari sub kegiatan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Selanjutnya pada sub kegiatan Peneyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor persentase realisasinya 0% hal di sebabkan karena tidak dilaksanakannya revitalisasi instalasi listrik pada kantor BPKPD, di samping itu jumlah anggaran tidak memungkinkan sehingga belanja jasa teknisi mekanik dan listrik tidak bisa di realisasikan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui program, kegiatan dan subkegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif. Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) Tujuan Strategis dan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dari uraian pada Bab III di atas, tergambar bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja utama tersebut, terdapat 1 (satu) yang capaian kinerjanya 100%, 2 (dua) indikator kinerja utama masih sementara berjalan reviunya dan 1 (satu) indikator kinerja utama di bawah 100%. Berdasarkan penjelasan di

atas masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang capaiannya di bawah 100% yaitu indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah hanya tercapai 5,39%. Untuk itu masih dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian tersebut dengan cara berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sosialisasi yang intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya.

Benteng, Februari 2023

**Mengetahui**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah,

**Drs. MUHTAR, M.M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680123 199311 1 001